



Senang Bisa Belanja Daging Ayam

■ BPNT Naik Jadi Rp150 Ribu per Bulan

YOGYA, TRIBUN - Rencana kenaikan nominal bantuan lewat Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari pemerintah mendapat respons positif dan sejumlah warga. Mereka merasa, naiknya nominal bantuan tersebut akan membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan utamanya dari sisi pangan.

"Belum tahu kalau mau naik (BPNT). Tapi kalau benar naik, ya, saya tentu senang. Supaya bisa untuk menyediakan kebutuhan konsumsi di rumah. Selama ini kan dapatnya cuma beras dan telur saja. Kalau ada tambahan bisa dapat bahan makanan lain," kata Suwardi, bapak dua anak asal Kasongan, Bantul, yang biasa berjualan rujak keliling.

Suwardi, saat ini mengaku belum terlalu tahu bagaimana detail kenaikan bantuan itu akan diwujudkan. Namun, ketika mengetahui

Ya, senang lah kalau bisa dapat bantuan daging ayam. Soalnya jarang-jarang makan daging ayam.

SUWARDI
Warga Kasongan

Rincian KK di DIY terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM):

Wilayah	Jumlah KK
di Kulonprogo	49.515 KK
di Sleman	65.601 KK
di Yogyakarta	17.634 KK
di Bantul	83.998 KK
di Gunungkidul	88.267 KK

Keluarga Penerima Manfaat di DIY

- Total ada 305.015 KK di DIY terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Mekanisme penyerahan BPNT masih sama, diberikan dalam bentuk uang non-tunai dan dicairkan dengan Kartu Keluarga Sejahtera yang dimiliki KPM. BPNT kali ini ada tambahan anggaran untuk belanja daging, ayam, ikan, sayuran.

Fig. Tri Hastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Senang Bisa

• Sambungan Hal 1

bahwa tambahan bantuan nontunai akan diwujudkan dalam bentuk daging ayam atau ikan dan juga sayur mayur, Suwardi mengaku cukup senang dan merasa terbantu.

"Ya, senang lah kalau bisa dapat bantuan daging ayam. Soalnya jarang makan daging ayam. Paling tahu atau tempe. Kadang telur. Kalau sayur, istri saya sudah sering masak sayur. Ada kebun sayur kecil di rumah saya. Tapi, ya, saya sudah senang sekali ada tambahan bantuan," kata Suwardi.

Senada, Siti Aminah yang juga penerima bantuan BPNT asal Kalasan mengaku senang jika benar-benar ada tambahan bantuan. Karena dengan tambahan bantuan itu, ia bisa mengalokasikan pendapatannya sehari-hari untuk keperluan lainnya yang juga tidak kalah penting. Misanya,

untuk tambahan konsumsi lainnya.

"Ya, kalau benar nanti ada tambahan bantuan buat beli daging ayam, saya bisa pakai uang dari penghasilan untuk anggaran kebutuhan lainnya. Bisa tambah untuk bayar listrik atau membayar buku anak saya," kata Siti, penjual sayur keliling di daerah Kalasan, Sleman.

Warga DIY yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat imbas dari kenaikan nominal Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dari sebelumnya Rp110.000, menjadi Rp150.000 mulai awal tahun ini.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Untung Sukaryadi mengatakan, sampai saat ini, terdapat 305.015 KK di DIY terdaftar sebagai KPM. Dengan rincian, 65.601 di Sleman, 49.515 di Kulon Progo, 88.267 Gunungkidul, 83.998 di Bantul, dan 17.634 di Kota Yogyakarta.

Menurutnya, meski nominal yang diterima meng-

alami perubahan, mekanisme penyerahan BPNT masih sama seperti dulu. Dalam artian, bantuan ini tetap diberikan dalam bentuk uang non-tunai dan dicairkan dengan Kartu Keluarga Sejahtera yang dimiliki KPM.

"Mekanismenya tetap sama, setiap bulan dikirimkan ke masing-masing penerima manfaat. Secara teknis tidak ada perubahan, hanya manfaatnya saja yang tambah, jadi lebih besar," katanya, Kamis (23/1).

Menariknya, jika pada BPNT sebelumnya setiap KPM hanya mendapat jatah untuk belanja beras, serta telur, untuk tahun ini jenis makanan yang didapat para KPM lebih bervariasi. Dari BPNT yang didapat mereka bisa berbelanja daging, ayam, ikan, dan sayuran.

Kendala

Walau begitu, Untung tidak menampik, berdasar hasil evaluasi pelaksanaan program BPNT tahun lalu,

masih terdapat beberapa kendala yang dijumpai oleh Dinsos DIY. Salah satunya, saldo di rekening KPM, yang tak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima.

"Jumlah saldo yang dikreditkan E-Wallet Himbara ke rekening KPM itu tidak sesuai. Contohnya di Sleman, nominal di E-Wallet ada yang Rp110, lalu ada Rp11. Padahal seharusnya kan jumlahnya Rp110.000 per KPM, ya, setiap bulannya," ucapnya.

Selain itu, mekanisme perubahan data, semisal terjadi kartu hilang, maupun KPM yang meninggal dunia dan sebagainya, dinilai membutuhkan waktu serta proses yang cukup lama. Begitu juga pada proses top up E-Wallet Himbara, ketika penggantian KKS. "Kemudian, masih dijumpai saldo nol yang dikarenakan kegagalan pengkreditan E-Wallet Himbara ke rekening milik KPM," pungkas Untung. (sus/aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005